

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT)
DALAM UPAYA PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR
(Studi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang)**

Yuanita Anggraini, Tjahjanulin Domai, Abdullah Said

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: yuanita_anggra@yahoo.co.id

Abstract: *The Implementation of Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) for the Development of Coastal Region (Study at Desa Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Malang). Indonesia is a country of the sea that accounts compared to the land. However this high potential sector is inversely related to the condition of coastal communities. These communities live below poverty line and remain in scarcity. The government attempts to resolve this coastal problem with Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) to 38 area. Malang is one of the district that appointed for this program by Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Pursuant to the results of data analysis, the conclusion is elucidated as follows. The implementation of Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh in Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang show that three focuses of this program are well executed whereas two other focuses are not implemented. The implemented fostering activity is concerning with resources, environment/infrastructure, and disaster alert. The unimplemented fostering activity include those related with human and business. It is then recommended that the implementation of program must be consistent with the reliable fund, there shall be cooperation and coordination with the related parties to resolve the regulation and there must be an improvement in the monitoring and evaluation program.*

Keywords: *program implementation, coastal village, coastal region development*

Abstrak: **Implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dalam Upaya Pembangunan Wilayah Pesisir (Studi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang).** Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah lautan 70% lebih besar dibandingkan dengan wilayah daratan. Potensi Indonesia yang sangat besar tersebut berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat yang hidup di dalamnya. Masyarakat pesisir hidup dibawah garis kemiskinan dan kerentanan terhadap bencana. Pemerintah dalam hal ini memberikan sebuah program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh kepada daerah pesisir di 38 Kabupaten/Kota untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu daerah yang mendapat program ini adalah Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti maka di dapat kesimpulan bahwa implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di desa Tambakrejo menunjukkan bahwa tiga fokus kegiatan bina telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan bina tersebut adalah bina sumber daya, bina lingkungan/ infrastruktur, dan bina siaga bencana. Sedangkan kegiatan yang tidak terlaksana adalah bina manusia dan bina usaha. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah implementasi program haruslah didukung dengan dana yang cukup, perlu koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder* lain, dan perlu adanya pengawasan maupun evaluasi yang efektif.

Kata kunci: implementasi program, desa pesisir, pembangunan wilayah pesisir

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi yang luar biasa di berbagai sektor termasuk sektor perikanan dan kelautan. Hal ini merupakan implikasi dari posisi Indonesia yang lebih besar wilayah laut dari pada daratannya. Potensi yang begitu besar seharusnya mampu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

terutama untuk masyarakat di wilayah pesisir. Namun kenyataannya, berbagai potensi yang ada hanya mampu dimanfaatkan sekitar 20% saja yang justru membawa dampak yang kurang baik terhadap masyarakat pesisir. Hal ini terlihat dari banyaknya permasalahan yang terjadi di kawasan pesisir seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan atau ekosistem pantai, belum mandiri nya organisasional desa, serta keterbatasan

infrastruktur desa pesisir. Permasalahan tersebut keempat masalah tersebut memberikan andil terhadap tingginya kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim.

Permasalahan kerentanan terhadap bencana di kawasan desa pesisir bukanlah hal baru yang dihadapi oleh negara maritim seperti Indonesia. Salah satu wilayah yang rentan terhadap bencana adalah kawasan pesisir kabupaten Malang. Hal ini sejalan dengan data geologi dari forum PDPT yang menyatakan bahwa wilayah pantai Jawa Timur beresiko sedang Tsunami yaitu meliputi wilayah Kabupaten Malang, Blitar, Lumajang dan Tulungagung. Untuk menyikapi tingginya kerentanan desa pesisir terhadap bencana maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat sebuah kebijakan dalam bentuk Program yaitu Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2013 Tentang pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan. Program ini meliputi usaha untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir bukan hanya dari segi perekonomian tetapi juga ketangguhan terhadap bencana.

Salah satu desa yang ditunjuk untuk melaksanakan program PDPT ini adalah desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Desa Tambakrejo merupakan salah satu desa pesisir yang sejauh ini memiliki 12 pantai yang telah dikembangkan baik untuk sektor pariwisata maupun perikanan. Di sisi lain, desa Tambakrejo merupakan desa yang rentan terhadap bencana banjir rob, abrasi dan bahkan tsunami skala sedang. Salah satu bencana yang setiap tahun menyerang adalah banjir rob yang menggenangi pemukiman nelayan sejauh 1,7 km dan menerjang 60 kepala keluarga. Melalui program PDPT, diharapkan ketangguhan dan ketangguhan masyarakat bisa lebih baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi program pengembangan desa pesisir tangguh di desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Selain itu, penulis juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik.

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Anderson yang dikutip oleh Agustino (2008, h.17) adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang memiliki tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh

stakeholder atau aktor kebijakan yang berhubungan dengan suatu permasalahan tersebut. Pada dasarnya kebijakan publik merupakan wujud intervensi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut Ripley dalam Widodo (2007, h.16) tahapan pembuatan kebijakan publik dimulai dari (a) penyusunan agenda, (b) formulasi dan legitimasi tujuan serta program, (c) implementasi program, kinerja aktor, dan *impact*, (d) keberlanjutan program di masa depan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan sebuah tahap yang penting dalam kebijakan publik. Menurut Nugroho (2014, h.567) implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Bahkan Wahab (1990, h.50) menyebutkan bahwa suatu kebijakan akan menjadi wacana saja jika tidak dapat diterima, diimplementasikan dan dipaksakan pelaksanaannya oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, implementasi program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh dianalisis dengan menggunakan model implementasi Smith. Menurut Smith dalam Syahrani (2014, h.2) model tersebut memiliki empat variabel yaitu (a) *idealized policy* yang merupakan pola interaksi yang dilakukan oleh implementor untuk mempengaruhi target groups. (b) *Target Groups* yaitu masyarakat yang akan dipengaruhi oleh program tersebut, dalam hal ini adalah KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir), (c) *Implementing Organization* yang merupakan implementor atau pelaksana program, (d) *Environmental Factors* yang merupakan lingkungan yang ada di masyarakat baik lingkungan sosial, budaya, organisasi, ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program.

3. Teori Pembangunan

Pembangunan menurut Rogers dalam Suryono (2010, h. 3-4) adalah suatu proses perubahan sosial untuk menjadi lebih baik yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material masyarakat itu sendiri. Dalam perkembangannya, teori pembangunan mengalami pergeseran paradigma termasuk pemberdayaan. Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh tersebut merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat.

4. Pembangunan Lembaga (*Institutional Building*)

Menurut Sugiyanto (2002, h.19) *Institutional Building* (pembangunan lembaga) adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, penataan, dan pengarahannya maupun bimbingan untuk organisasi yang baru berdiri maupun yang disusun kembali. Dalam pembangunan lembaga, ada beberapa variabel yang dibangun kembali yaitu kepemimpinan, nilai atau tujuan organisasi, program, sumberdaya, dan struktur organisasi.

Pembangunan lembaga menurut Esman dalam Triana (2010, h.2) dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal berikut yaitu:

1. Mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik dan sosial.
2. Menetapkan, mengembangkan, dan membina hubungan-hubungan normative dan pola tindakan yang baru
3. Membina jejaring atau keterkaitan untuk member dukungan terhadap lingkungannya sedangkan konsep kelembagaan diartikan sebagai kondisi akhir yang diharapkan sebagai variabel evaluative untuk menilai keberhasilan pembangunan lembaga itu sendiri.

Variabel yang penting dalam pembangunan lembaga dan merupakan fokus dari pembangunan lembaga itu sendiri menurut Sugiyanto (2002, h. 82-88) adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan
Kepemimpinan disini dimaksudkan sebagai sekelompok orang yang berwenang dalam perumusan program dan doktrin serta implementasinya.
2. Doktrin
Doktrin dimaksudkan sebagai spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan, metode operasional yang mendasari tindakan sosial.
3. Program
Program merupakan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa merupakan keluaran dari lembaga itu sendiri
4. Sumberdaya
Sumberdaya merupakan masukan-masukan yang berupa fisik, manusia dan teknologi. Sumberdaya merupakan salah satu hal terpenting dalam pembangunan lembaga. Semakin sumber daya tersebut melimpah dan beragam maka akan semakin mudah untuk dikembangkan sehingga mendukung keberhasilan sebuah pembangunan lembaga.

5. Struktur Internal

Struktur internal merupakan struktur dan proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut. Lingkup yang terpenting disini adalah pembagian peranan dalam organisasi, pola-pola wewenang, sistem komunikasi, komitmen personal dari doktrin dan program lembaga.

1. Wilayah Pesisir

Menurut Adisasmita (2008, h.120) kawasan pesisir adalah ruang daratan yang merupakan perbatasan antara ekosistem yang ada di darat dan laut. Lebih lanjut Adisasmita (2008, h.138) menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang erat kaitannya dengan wilayah pesisir yaitu aspek sosial, ekonomi, ekologi dan administratif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2014, h.5) merupakan penelitian deskriptif merupakan metode atau prosedur pemecahan masalah yang diamati dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan yang tampak dan sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang sampai tahap mana pelaksanaan program pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT) di desa Tambakrejo dan beberapa faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya. Data diperoleh dari lapangan yaitu desa Tambakrejo dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung ketika turun ke lapangan dan juga data pendukung yang diperoleh dari dokumen seperti laporan pelaksanaan dan sebagainya.

Pembahasan

1. Implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh dalam Upaya Pembangunan Wilayah Pesisir

Implementasi program pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT) di desa Tambakrejo, Kabupaten Malang dilaksanakan mulai tahun 2013 selama dua tahun sampai tahun 2015. Pelaksanaan program ini meliputi lima fokus kegiatan bina dalam rangka meningkatkan ketangguhan dan ketanggapan masyarakat terhadap bencana di wilayah pesisir. Lima fokus bina yang diusung dalam program ini adalah bina manusia, bina usaha, bina sumber daya, bina lingkungan/infrastruktur dan juga bina siaga bencana dan perubahan iklim.

Kegiatan bina manusia adalah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pesisir yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Bina usaha adalah kegiatan yang diusung untuk meningkatkan pendapatan dari sektor usaha atau perekonomian. Sedangkan kegiatan bina sumberdaya berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya atau potensi yang ada dengan mengedepankan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Kegiatan yang ke empat adalah bina lingkungan atau infrastruktur yaitu kegiatan yang memiliki output berupa perbaikan lingkungan pesisir seperti vegetasi pantai dan infrastruktur desa. Kegiatan terakhir yang menjadi fokus PDPT adalah bina siaga bencana yang merupakan prioritas karena berkaitan dengan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Tahap pelaksanaan Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ini adalah dimulai dari pembentukan lembaga baru di Desa Tambakrejo yang akan menjadi wadah masyarakat dalam meningkatkan ketangguhannya. Masyarakat pesisir yang rentan bencana dilembagakan menjadi Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) yang terdiri dari lima KMP dalam satu desa. Hal ini dimaksudkan bahwa satu KMP membawahi satu fokus bina PDPT. KMP disini berperan sebagai target groups dan juga implementor. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan PDPT dilaksanakan oleh KMP yang di dukung oleh tenaga pendamping dan tim pemberdayaan desa.

Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan di rencanakan dengan baik yang mencakup dari lima kegiatan bina. Namun pada implementasinya, hanya ada beberapa bina saja yang terimplementasi. Kegiatan yang terimplementasi dengan baik adalah kegiatan bina sumberdaya yaitu berupa peningkatan kualitas vegetasi pantai dengan anggaran sebesar Rp. 76.550.000. Selanjutnya kegiatan bina infrastruktur dan lingkungan berupa pembangunan TPA, MCK, dan beberapa jembatan baik jembatan mangrove maupun jembatan untuk jalur evakuasi dengan anggaran sebesar Rp. 337.000.000. Bina selanjutnya adalah bina siaga bencana yang dilaksanakan dengan pembangunan pos pantau di area pantai Sendiki dan Tamban yang rawan banjir, abrasi dan bahkan tsunami dengan anggaran Rp. 192.342.000.

Meskipun tiga bina terlaksana dengan baik, namun dua kegiatan bina tidak terlaksana karena memang masyarakat merasa bahwa bina manusia dan bina usaha dapat dilaksanakan sejalan dengan kegiatan lainnya. Sehingga dapat

meminimalisir anggaran yang dapat di pos kan ke kegiatan yang lebih menjadi prioritas yaitu sumberdaya, bina infrastruktur dan bina siaga bencana. Implementasi program berjalan dengan baik karena adanya komunikasi yang baik antara implementor, *target groups*, dan juga evaluator. Proses pelaksanaan program dimulai dari sosialisasi tahap pertama kepada aparat desa dan motivator program di ruang rapat pemerintah daerah Kabupaten Malang. Sedangkan sosialisasi tahap dua dilaksanakan di balai desa tambakrejo kepada seluruh elemen yang ada. Selanjutnya Kelompok Masyarakat Pesisir di damping oleh tenaga pendamping, motivator program dan juga di awasi oleh dinas perikanan dan kelautan melakukan diskusi yang disebut FGD (*Focus Discussion Group*) dan PRA (*Participatory Rural Approach*) untuk mendapat hasil yang terfokus berkaitan dengan rencana pembangunan wilayah pesisir dan kegiatan PDPT. Setelah itu diputuskan mana kegiatan yang menjadi prioritas dengan *scoring*. Sedangkan pelaksanaannya sendiri dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan dengan output berupa pembangunan fisik yaitu MCK, jembatan, jalur evakuasi, TPA, pipanisasi, pengadaan air, dan perbaikan ekosistem pantai.

Berdasarkan model pengembangan yang di gagas, maka dapat diamati bahwa *outcome* yang diharapkan adalah terbebasnya masyarakat dari garis kemiskinan, keberlanjutan kelembagaan desa, kemandirian keuangan desa, perbaikan ekologi pantai, dan juga ketangguhan terhadap bencana. Berdasarkan dari pengamatan di lapangan, capaian dari program ini adalah masyarakat yang cukup tangguh dari segi bencana, ekonomi, maupun sosial. Hal tersebut tercermin dari tanggapnya masyarakat terhadap peringatan bencana, peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata berbasis ekowisata yang dikembangkan di desa Tambakrejo.

Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh merupakan suatu program dengan pendekatan nilai yang dilakukan kepada masyarakat daerah pesisir sehingga nilai-nilai lokal yang terkandung di dalam program seperti kebersamaan, kerjasama, partisipasi, dan gotong royong dapat terus dibina dan dibentuk untuk mendukung ketercapaian *output* maupun *outcome*. Jika dilihat dari perspektif *institutional building* (pembangunan kelembagaan) maka beberapa variabel yang terkandung di dalam *institutional building* dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang diterapkan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang merupakan

kepemimpinan yang demokratis- partisipatif yang mendukung berjalannya program yang berbasis *bottom up*. Kepemimpinan yang diterapkan sangat menunjang keberhasilan Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh yang membawa implikasi pada ketangguhan masyarakat pesisir dengan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap ekologi atau lingkungan. Doktrin yang diterapkan adalah nilai-nilai kegotongroyongan, *non-economic oriented*, dan partisipatif.

2. Doktrin
Doktrin yang diterapkan dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh adalah nilai kebersamaan, kegotongroyongan serta, kesadaran terhadap pentingnya lingkungan.
3. Program
Program yang digagas dalam konsep kelembagaan di desa Tmbakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ini adalah program-program pemberdayaan masyarakat seperti PUAP serta PDPT (Pengembangan Desa Pesisir Tangguh).
4. Sumberdaya
Sumberdaya yang tersedia di desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang merupakan sumberdaya yang melimpah baik sumberdaya Alam maupun Sumber Daya Manusia. Sumberdaya alam yang ada dan dimanfaatkan berupa daratan dan lautan sehingga pengembangan desa dilakukan di dua wilayah tersebut. Sedangkan kualitas SDM sudah cukup memadai tetapi diperlukan peningkatan kualitas.
5. Struktur Internal
Struktur yang digagas dalam proses pembentukan lembaga tersebut adalah dengan pembentukan beberapa Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) yang bertindak sebagai kelompok yang menjalankan program dan juga sekaligus sebagai masyarakat yang dikenai program. Artinya, bahwa KMP juga merupakan masyarakat yang akan dipengaruhi oleh program PDPT.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat pembangunan yang dilakukan dari adanya Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik tercermin dari tersedianya beberapa fasilitas umum sebagai fasilitas penunjang pengembangan ekowisata di daerah Sendang Biru seperti toilet umum dan pos pantau. Selanjutnya, pembangunan fisik juga dilakukan untuk pembangunan jalan evakuasi jika terjadi bencana banjir Rob dan perbaikan beberapa infrastruktur desa. Sedangkan

pembangunan non fisik yang dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas SDM seperti pelatihan *guide* dan peningkatan keterampilan masyarakat nelayan Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program

Keberhasilan program tidak terlepas oleh beberapa faktor yang mendukung baik dari lingkungan eksternal maupun internal program itu sendiri. Implementasi program ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Tersedianya sumberdaya atau potensi baik SDM maupun SDA yang potensial untuk dikembangkan. Aparat desa dan pelaksana program yang berkomitmen kuat terhadap tercapainya ketangguhan desa juga mendukung berjalannya program. Hal ini tercermin dari kerjasama yang erat dari seluruh elemen baik kepala desa, aparat desa, tim pemberdayaan desa, dan POKMASWAS.
2. Adanya keterlibatan *stakeholder* lain yang ikut mendukung kinerja *implementor*. Meskipun keterlibatannya berupa sosialisasi, pelatihan dan seminar dari Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja *implementor*.
3. Partisipasi masyarakat yang aktif tidak hanya sekedar menerima informasi tetapi juga memberikan pendapat mengenai ide, gagasan, dan pemikiran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketangguhan masyarakat yang ditempuh dengan pembangunan fisik maupun non fisik.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program PDPT di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang adalah:

1. Adanya gesekan peraturan yang berhubungan dengan program ini. Wilayah pesisir yang dibangun dan dikembangkan berada di bawah kewenangan perhutani dan juga pemerintah daerah. Sehingga terjadi gesekan antara Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 yang sama-sama mengatur tentang wilayah pesisir. Sehingga *implementor* kurang leluasa dalam melakukan pengembangan potensi yang ada di kawasan pesisir.
2. Pergantian pemimpin dalam hal ini adalah pergantian presiden RI. Kebijakan PDPT ini dikeluarkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketika masa transisi tersebut sedikit menghambat turunnya dana dan mekanisme

pencairan dana program. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program terhambat selama hampir 4 bulan.

3. Keterbatasan dana dan waktu, pengembangan potensi yang luar biasa besar tidak akan berhasil jika tidak di dukung dengan adanya dan yang cukup. Pelaksanaannya pun tidak akan tepat waktu jika waktu yang ditetapkan tidak sesuai. Salah satu penghambat pelaksanaan program ini adalah keterbatasan dana sehingga tidak semua kegiatan bina dapat diimplementasikan dan hanya tiga kegiatan bina yang dapat di laksanakan dengan baik.

Kesimpulan

Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang berlangsung selama 2 tahun sejak tahun 2013. Berdasarkan program tersebut ada lima fokus kegiatan bina yang direncanakan. Akan tetapi hanya tiga kegiatan bina yang terimplementasi yaitu bina sumberdaya, bina infrastruktur/ lingkungan, bina siaga bencana. Kegiatan yang tidak terimplementasi adalah bina manusia dan bina usaha karena keterbatasan dana dan waktu sehingga dua kegiatan tersebut tidak menjadi prioritas. Berdasarkan hasil pengamatan di dapat hasil dari program adalah desa pesisir yang cukup tangguh terkait masalah ekonomi, ekologi, dan bencana.

Daftar Pustaka

- Abdul-Wahab, Solichin. (1990) **Pengantar Analisis Kebijakan Negara**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2008) **Ekonomi Archipelago**. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. (2008) **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Bandung, Alfabeta.
- Moleong, Lexy. (2014) **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung, PT. Rosdakarya.
- Nungroho, Riant. (2014) **Publik Policy**. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan**. Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Sugiyanto. (2002) **Lembaga Sosial**. Jogjakarta, Global Pustaka Utama.
- Suryono, Agus. (2010) **Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan**. Malang, UB Press.
- Syahrani. (2014) **The Important Of Control Variable in Policy Implementation Model Of Smith's Theory**. IOSR Journal for Humanities and Social Science, 19 (3) November, p. 2.
- Triana, Rochyati Wahyuni. (2010) **Reformasi Pembangunan Lembaga: Melembagakan Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. (2007) **Kebijakan Publik: Teori dan Proses**. Yogyakarta, Media Pressindo.